

## **PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**Dina Hidayat<sup>1</sup>, Marta Sari<sup>2</sup>, Firdaus AR<sup>3</sup>**

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau<sup>1, 2, 3</sup>

Email: [dinahidayat@eco.uir.ac.id](mailto:dinahidayat@eco.uir.ac.id)<sup>1</sup>

---

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Indragiri Hilir, dengan tujuan untuk menguji pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Indragiri Hilir. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan jumlah sampel sebanyak 33 SKPD. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Indragiri Hilir.

**Kata Kunci:** Standar akuntansi pemerintah, kualitas aparatur pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan

---

### **PENDAHULUAN**

Pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan Keuangan Pemerintah daerah, merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban pemerintah daerah tersebut. Pelaporan keuangan akan menjamin terlaksananya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pelaporan keuangan ini juga merupakan bentuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government governance*).

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan output dari sistem akuntansi pemerintahan. Pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan telah

diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan menetapkan standar akuntansi pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ini, penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual mulai diterapkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mensyaratkan empat karakteristik, yaitu: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami sebagai prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Oleh karena itu, akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu: (1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, (2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan, (3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, (4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, (5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, (6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk menghasilkan Laporan keuangan yang berkualitas, maka instansi pemerintah harus menerapkan akuntansi pemerintahan yang sesuai dengan standar akuntansi

Pemerintah daerah diharuskan menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah

daerah sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan Arif Ardi Kusuma (2012) tentang “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kota Tasikmalaya”, menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara penelitian Emilda Ihsanti (2014) menyatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Menurut Nasaruddin (2008) dalam Emilda Ihsanti(2014) “sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai yang tinggi disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan”. Oleh karena itu untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas dan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Entitas pemerintahan, yang diwajibkan untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas, akan membutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah, bahkan organisasional tentang pemerintahan (Roviyantie, 2012).

Penelitian Emilda Ihsanti (2014) menyatakan bahwa Kompetensi Sumberdaya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Penelitian Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo (2013) menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) dan Kualitas Aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo (2013). Yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah objek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tiga kali dalam beberapa tahun belakang, yaitu pada tahun 2016 sampai tahun 2018. Setelah sebelumnya untuk periode 2011 sampai 2015, mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

## **KONSEP TEORI**

### **Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010). Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas (PP No. 71 Tahun 2010). Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan. Untuk mencapai hal tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan

menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan (Zeyn, 2011). Dengan demikian, penyelenggaraan akuntansi di pemerintah daerah harus merujuk baik pada Standar Akuntansi Pemerintahan maupun pada peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Dalam praktiknya, dua rujukan tersebut disinkronkan didalam kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah (Budi Mulyana, 2014:6).

### **Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), yaitu SAP diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Melalui

penerapan SAP akan dapat disusun laporan keuangan yang *useful*. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus mengacu pada Peraturan Pemerintah yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sampai dengan tahun anggaran 2013, pemerintah daerah masih menerapkan SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Perbedaan fundamental Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terletak pada basis pencatatan transaksi dan jenis laporan keuangan.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Adapun delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010) yaitu: Basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisitasi, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar

### **Laporan Keuangan**

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 paragraf 9 sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam PSAP No. 1 dinyatakan bahwa laporan keuangan yang diatur dalam PSAP adalah laporan keuangan untuk tujuan umum. Dimana laporan keuangan dengan tujuan umum adalah laporan keuangan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan penggunaannya yaitu masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah.

Laporan keuangan yang harus disusun menurut Standar Akuntansi Pemerintahan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (8) Catatan Atas Laporan Keuangan. Pemerintah pusat maupun daerah wajib menyajikan kedelapan laporan keuangan tersebut.

### **Kualitas Laporan Keuangan**

Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010) menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah adalah:

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu

atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :

- a. Manfaat umpan balik (*feedback value*).  
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
  - b. Manfaat prediktif (*predictive value*).  
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
  - c. Tepat waktu (*timeliness*).  
Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
  - d. Lengkap.  
Informasi yang disajikan mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:
- a. Penyajian jujur.  
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang

seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*).  
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
  - c. Netralitas.  
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
  4. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

### **Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah**

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukan bahwa uang publik telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014:122) menyatakan bahwa untuk menjamin pelaksanaan

kegiatan organisasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan organisasi, diperlukan adanya sistem pengendalian manajemen. Salah satu bentuk pengendalian manajemen adalah pengendalian kinerja. Pengendalian kinerja merupakan evaluasi terhadap kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem pengukuran kinerja sektor publik.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai capaian suatu strategi melalui tolok kinerja yang telah ditetapkan (Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, 2014:122). Tolok ukur kinerja yang ditetapkan tersebut dapat berupa pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Salah satu tolok ukur kinerja non keuangan yang perlu menjadi perhatian adalah kinerja sumber daya manusia. Nasaruddin (2008) dalam Emilda Ihsanti (2014) mengatakan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai yang tinggi disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan.

Kompetensi aparatur pemerintah atau Sumber Daya Manusia adalah “kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensi harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*)” (Emilda Ihsanti, 2014).

Sumber daya manusia pada pemerintah daerah adalah aparatur sipil

negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa: “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dijelaskan lagi bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.”

Untuk mengetahui kualitas aparatur pemerintah, aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota melakukan pengawasan interen terhadap organisasi dipemerintahan tersebut. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (PP No. 60 Tahun 2008).

### **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman dan prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan untuk

tujuan pelaporan kepada pengguna laporan keuangan. Dengan demikian *signifikansi* peran akuntansi sektor publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, semakin nyata dengan dikeluarkannya PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yang kemudian direvisi dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur SAP berbasis Akrua. Peraturan Pemerintah tersebut menjadi dasar hukum pemerintah dalam menyusun laporan keuangan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Abdul Halim, 2012:261). Dengan adanya standar, maka laporan keuangan dituntut untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga dengan penerapan SAP, kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah akan meningkat.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. Semakin tinggi tingkat penerapan Standar

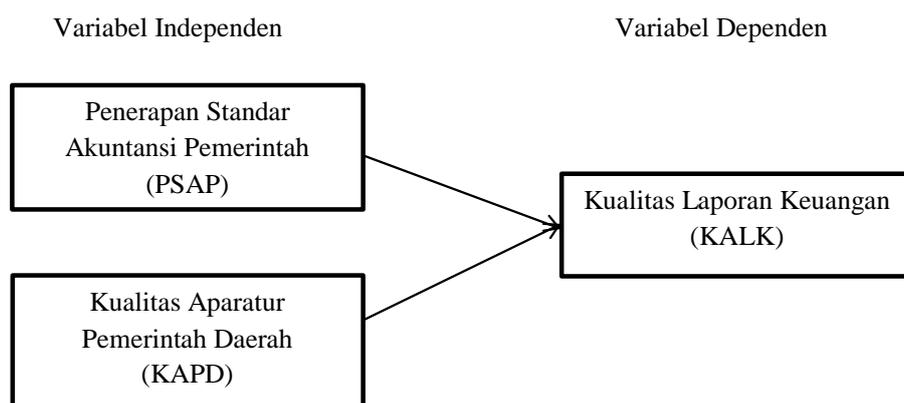
Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka kualitas laporan keuangan pemerintahan akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat Penerapan Standar Akuntansi (SAP) maka kualitas laporan keuangan pemerintah akan semakin rendah.

### **Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Aparatur Pemerintah Daerah adalah para Pegawai negeri sipil daerah (PNSD). PNSD yang profesional dibutuhkan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. PNSD yang profesional akan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara tuntas. Dengan kompetensi yang dimilikinya, PNSD yang profesional akan dapat memenuhi standar dan target kinerja yang telah ditetapkan. PNSD yang kompeten di bidang akuntansi (keuangan) mampu menyusun laporan keuangan sesuai SAP. Penerapan SAP membutuhkan kompetensi PNSD agar laporan keuangan yang disusun memenuhi kualifikasi informasi yang berguna (*useful*). Sehingga semakin tinggi kualitas aparatur pemerintah daerah, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan.

### **Model Penelitian**

#### **Gambar 1. Model Penelitian**



### Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori, pada penelitian ini akan dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut:

- H1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
- H2: Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
- H3: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

### METODE PENELITIAN

#### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah semua SKPD dilingkungan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 53 SKPD. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* sebanyak 33 SKPD untuk memenuhi distribusi normal statistik, mengambil 33 SKPD sebagai sampel karena SKPD tersebut merupakan SKPD yang terdekat dari Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir untuk memudahkan pengambilan data dan mempersingkat waktu penelitian. Responden dalam penelitian ini yaitu kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD), staf akuntansi / pembukuan / keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kepala sub bagian keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada masing-masing SKPD akan dipilih 3 responden berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, adapun responden yang akan diteliti berjumlah 99 orang.

#### Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Variabel Independen (X)

Variabel Independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

##### a. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ( $X_1$ )

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (SAP). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Penyajian laporan keuangan, (2) Laporan realisasi anggaran berbasis kas, (3) Laporan arus kas, (4) Catatan atas laporan keuangan, (5) Akuntansi persediaan, (6) Akuntansi investasi, (7) Akuntansi aset tetap, (8) Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, (9)

Akuntansi kewajiban, (10) Koreksi kesalahan, dan (11) Laporan keuangan konsolidasi. Instrumen yang digunakan untuk mengukur Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari 13 item pertanyaan yang diadopsi dari kuesioner yang digunakan dalam Lastarina (2014), dengan menggunakan skala likert 5 poin.

b. Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah ( $X_2$ )

Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah atau sumberdaya manusia merupakan faktor terpenting untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas, yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Aparatur Pemerintah diartikan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yakni melayani, mangayomi dan menumbuhkan prakarsa serta partisipasi masyarakat, (Lastarina, 2014). Indikator variabel Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Kualitas kerja; (2) Kualitas hasil kerja; (3) Kepatuhan terhadap instruksi; dan (4) Sikap positif pegawai. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner yang diadopsi dari Lastarina (2014), dengan menggunakan 7 item pertanyaan, dengan skala Likert 5 poin.

## 2. Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen (terikat) yaitu merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen (bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah: Kualitas Laporan Keuangan, Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, (SAP PP Nomor 71 Tahun 2010). Indikator variabel Kualitas Laporan Keuangan ialah: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, dan (4) Dapat dipahami. Pengukuran variabel kualitas

laporan keuangan menggunakan instrumen kuesioner yang diadopsi dari Lastarina (2014), menggunakan 10 item pertanyaan, dengan skala Likert 5 poin.

## Jenis dan Sumber Data

Data penelitian yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh responden, yaitu kepala SKPD, kasubag keuangan, dan staf akuntansi/keuangan SKPD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hilir.

## Analisis Data

Analisis dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer dengan program SPSS. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan persamaan berikut:

$$KLK = \alpha + b_1PSAP + b_2KAPD + e$$

Keterangan:

KLK : Kualitas Laporan Keuangan

PSAP : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

KAPD : Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

$\alpha$  : Konstanta

$b_1, b_2$  : Nilai Koefisien Regresi

$e$  : *Error*

## HASIL

### Hasil Pengumpulan Data

Responden dari penelitian ini yaitu kepala SKPD, kabag/kasubbag keuangan, dan staf akuntansi/keuangan di masing-masing SKPD. Total kuesioner yang dibagikan sebanyak 99 kuesioner, total kuesioner yang dikembalikan adalah sebanyak 84 kuesioner, tidak kembali 15 kuesioner untuk 33 SKPD. Sehingga data yang

dapat dianalisis dalam penelitian ini adalah 84 kuesioner.

*cronbach alpha* yang kurang dari 0,6 sehingga instrument tersebut reliabel untuk digunakan.

## Uji Kualitas Data

### 1. Uji Validitas

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa skor masing-masing butir total (*pearson corelation*) memiliki korelasi yang positif dan signifikan pada level 0,01 sehingga seluruh kuesioner dinyatakan valid.

### 2. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas menunjukkan tidak ada koefisien dengan

## Analisis Data

Analisis Data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi berganda (*multiple regression*) dengan bantuan SPSS. Hasil dari pengujian menggunakan program SPSS tampak pada tabel 1.

Tabel 1. Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	18.984	3.959		4.795	.000					
PSAP	.245	.070	.367	3.515	.001	.473	.364	.332	.820	1.219
KAPD	.314	.131	.251	2.400	.019	.406	.258	.227	.820	1.219

a. Dependent Variable: KLK

Sumber: Data Olahan SPSS

Berdasarkan hasil analisis regresi diatas maka dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$KLK = 18,984 + 0,245 \text{ PSAP} + 0,314 \text{ KAPD}$$

Persamaan regresi di atas menunjukkan Nilai konstanta ( $\alpha$ ) adalah 18,984. Hal ini berarti jika penerapan standar akuntansi pemerintah (PSAP) dan kualitas aparatur pemerintah daerah (KAPD) bernilai 0 (nol), maka kualitas laporan keuangan daerah bernilai positif, yaitu 18,984 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai koefisien regresi variabel penerapan standar akuntansi pemerintah (PSAP) bernilai positif, yaitu 0,245, yang dapat diartikan bahwa setiap peningkatan penerapan standar akuntansi pemerintah sebesar 1 maka kualitas laporan keuangan juga

meningkat sebesar 0,245 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai koefisien regresi variabel kualitas aparatur pemerintah daerah (KAPD) bernilai positif, yaitu 0,314, dapat diartikan bahwa setiap peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah sebesar 1 maka kualitas laporan keuangan juga meningkat sebesar 0,314 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

## Pengujian Hipotesis

### Pengujian Hipotesis Simultan

Hasil uji hipotesis secara simultan dapat dilihat pada tabel 2. Berdasarkan hasil uji anova (*analysis of variance*), didapat F hitung sebesar 15,395 dengan tingkat signifikan 0,000. Karena tingkat signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 maka Hipotesis diterima.

Artinya secara bersama-sama penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

**Tabel 2. ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	206.077	2	103.039	15.394	.000 <sup>a</sup>
	Residual	542.161	81	6.693		
	Total	748.238	83			

a. Predictors: (Constant), KAPD, PSAP

b. Dependent Variable: KLK

Sumber: Data Olahan SPSS

**Pengujian Hipotesis Secara Parsial Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah**

Berdasarkan hasil pengujian data yang terlihat pada tabel 1, diperoleh nilai *t* hitung variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebesar 3,515 dengan tingkat signifikansi adalah 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**Hasil Pengujian Hipotesis Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian data yang terlihat pada tabel 1, diperoleh nilai

*t* hitung variabel kualitas aparatur pemerintah daerah (KAPD) sebesar 2,400, dengan tingkat signifikansi adalah 0,019. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**Analisis Hasil Penelitian Pengaruh Secara Simultan**

Secara simultan, penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Besarnya pengaruh kedua variabel independen ini terhadap kualitas laporan keuangan dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3. Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.525 <sup>a</sup>	.275	.258	2.587

a. Predictors: (Constant), KAPD, PSAP

b. Dependent Variable: KLK

Sumber: Data Olahan SPSS

Pada tabel *model summary* diatas, tampak bahwa koefisien korelasi (R) sebesar 0,525 mendekati nilai 1 artinya hubungan antara variabel

penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan sangat erat.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,275 menunjukkan bahwa 27,5% kualitas laporan keuangan dijelaskan oleh variabel penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah, sedangkan sisanya sebesar 72,5% dapat dijelaskan oleh variabel lain atau faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model atau persamaan regresi ini.

### **Pengaruh Secara Parsial**

#### **a. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan analisis regresi berganda pada tabel 1, secara parsial penerapan standar akuntansi pemerintah (PSAP) berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Bentuk pengaruh yang ditimbulkan tampak pada nilai  $r$  (*Coefficient Correlation Partial*) yang bernilai positif sebesar 0,364 yang dikuadratkan menjadi 13,25%. Sehingga dapat dikatakan bahwa 13,25% nilai kualitas laporan keuangan dijelaskan oleh variabel penerapan standar akuntansi pemerintah (PSAP). Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya kejelasan standar akuntansi pemerintah (PSAP) yang dipakai, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo (2013) dan Arif Ardi Kusuma (2012) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka ada kejelasan dan ketegasan standar yang bisa dipakai pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Sehingga laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengalami peningkatan kualitas. Hal ini tampak pendapat wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2016 dan setelahnya.

#### **b. Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan analisis regresi berganda pada tabel 1, tampak nilai  $r$  (*Coefficient Correlation Partial*) untuk variabel kualitas aparatur daerah (KAPD), bernilai positif, sebesar 0,258, yang jika dikuadratkan akan menjadi 6,65%. Sehingga dapat dikatakan bahwa 6,65% kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel kualitas aparatur pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan ditingkatkannya kualitas aparatur pemerintah daerah, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo (2013) dan Lastarina (2014) yang menyatakan bahwa kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam hal ini pemerintah wajib melakukan pengawasan intern terhadap organisasi dipemerintahan tersebut. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk

kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (PP No. 60 Tahun 2008).

Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota).  
<http://ejournal.unp.ac.id>.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan, penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Secara parsial, penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Kusuma, Arif Ardi. 2012. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Universitas Siliwangi, Jurnal

Lastarina. 2014. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Universitas Islam Riau:

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adhi, Daniel Kartika dan Yohanes Suhardjo. 2013. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. STIE Semarang, Jurnal

Halim, Abdul 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi, Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Ihsanti, Emilda. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*, (Studi